

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2025, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Widina Media Utama, Bandung.
- Agus, Kasiyanto, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno W, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Literasi Nusantara*, Malang.
- Edita, Elda, 2021, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Rajawali Pers, Depok.
- Elwi, Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fauzan dan Baharudin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Ika, Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi.
- Jan S, Maringka, 2018, *Reformasi Kejaksaan Dalam System Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawade, Hafidz Arsyad, 2003, *Korupsi dalam Perspektif HAM*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jusuf Kristiano dan Agus Wibowo dan dan Ratnawati, 2020, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Edisi Ketiga, Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwan, Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mukhlis Tarmizi dan Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala Univercity Press, Aceh.

Satjipto, Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono, Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Publishing, Jakarta.

Surachmin dan Suhandi, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Jurnal

Andhie, Arianto, 2024, “Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Andin Dwi Savitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 2025, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No.1.

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati A, dan Zain Irawan, 2023, “Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 6.

Annisa, Fitri Dewianti, Et. Al., 2024, “Ragam Korupsi Dari Berbagai Definisi: Analisis Jenis Dan Bentuknya”, *Jurnal Edukasi Terkini*.

Delfiandi, Muhammad Mulyadi, dan Wessy Trisna, 2024, “Analisis Yuridis Pengembalian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BNA)”, *Jurnal of Science and Social Research*, Vol. VII, No. 4.

Fadhlin Ade Chandra dan Fadhilatul Jahra Sianaga, 2021, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1.

Gerald, Pakasi, 2023, “Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 2, No. 6.

Handayani, Gusti Novita dan Mispansyah, 2025, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Badamai Law Jurnal*, Vol. 10, No.1.

Helmy Febrianto Rasyd, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed, 2026, “Kewenangan jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. Vol. 3, No. 2.

Iwan Setiawan Rahman, 2025, “Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *JATISWARA*. Vol. 40, No. 3.

Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, 2025, “Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam

Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*. Vol. 3, No. 3.

Nani Mulyati dan Aria Zurneti, 2022, “Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation.” *Andalas Jurnal of Socio-Humanities*. Vol. 4, No.1.

Riswan Munthe, Yusuf Hanafi Pasaribu, dan Sri Hidayani, 2024, “Permohonan Praperadilan Atas Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Mengandung Obscuur Libel”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 1.

Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya dan I Made Minggu W, 2021, "Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3.

Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi, 2020, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *Journal Of Criminal*. Vol. 1, No. 1.

Vananda Putra, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg”, *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1.

Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, 2023, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Zulkarnain, Pantoli, 2024, “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)”, *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 6.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Pdg.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2022/PT.Pdg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3755/K/Pid.Sus/2023.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Pdg.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Pdg

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2025/PT.Pdg.

Skripsi

Dwi, Melinay Widyas Baharsyah, 2022, “Perbandingan Peran Kejaksaan Antara Indonesia dan Amerika Serikat.” Skripsi Universitas Pancasakti, Tegal.

Ilham, Akbar, 2021, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Universitas Andalas, Padang.

Nidia, Alisa Kasnu, 2023, “Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang),” Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang.

Website

Black's Law Dictionary, Edisi Kedua. "Corruption", The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/corruption/>, dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2026, Jam 13.54

Ibnu Abas Ali, 2026. “Menafsir Frasa “Pejabat” di Pasal 605 & 606 KUHP Serta Implikasinya dalam Delik Suap”, <https://dandapala.com/article/detail/menafsir-frasa-pejabat-di-pasal-605-606-kuhp-serta-implikasinya-dalam-delik-suap>, dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2026, jam 20.44.

Kejaksaan Republik Indonesia, 2022. “Tugas dan Wewenang,” <https://badiklat.kejaksaan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 25 oktober 2025, jam 16.36.

Ridwan, Alfin Nur, 2025. “Indonesia: Negeri yang menangis di Atas Kuadriliun Korupsi,” <https://icw.or.id/ZHWJ>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2025, jam 18.51.

Rumah Pidana, 2025. “Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Menguak Harta Tersembunyi untuk Keadilan Negara,” <https://rumahpidana.id/2025/11/pemulihan-aset-hasil-tindak-pidana-korupsi-menguak-harta-tersembunyi-untuk-keadilan-negara/>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2026, jam 10.16.